

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI BUDAYA SEKOLAH DI SMAN 1 TARIK KABUPATEN SIDOARJO

**Fitra Aria**

11040254028 (Prodi S-1 PPKn, FISH, UNESA) [fitraariains@gmail.com](mailto:fitraariains@gmail.com)

**Harmanto**

0001047104 (PPKn, FISH, UNESA) [harmanto@unesa.ac.id](mailto:harmanto@unesa.ac.id)

### Abstrak

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Melalui pendidikan peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai kejujuran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Melalui budaya sekolah ini sebagai wujud pembentukan karakter siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambatnya. Informan di dalam penelitian yaitu Kepala Sekolah, guru PPKn, guru BK, penjaga kantin, dan siswa. Untuk memperoleh data, teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah yaitu adanya ekstrakurikuler pramuka dan kantin kejujuran sebagai langkah dalam membentuk nilai kejujuran siswa-siswi memiliki peran penting untuk mewujudkan karakter jujur.

**Kata Kunci:** Implementasi, pendidikan antikorupsi, budaya.

### Abstract

Education has an important role in developing anticorruption values. Through education, students can developing the value of honesty, faith, noble character, have the competence and professionalism and can become responsible citizens. Through this school culture as the build character of student. The purpose of this research are to describe the implementation of anti corruption education through school culture as well as describe the support and barrel factor. To obtain the existing data, then the techniques used are in-depth interviews, observation, and documentation, along with data analysis techniques used are interactive data model analysis techniques. The results of this research indicate that the implementation of anticorruption education through school culture i.e. the scout extracurricular and honesty canteen as the step for build value of honest student which have important role for existing the honest character.

**Keywords :** Implementation, anticorruption education, culture.

### PENDAHULUAN

Fenomena korupsi di negeri ini seolah menjadi masalah yang wajar ditemukan, pasalnya sering terungkap dan indikasi tindak kejahatan korupsi melalui pemberitaan baik media elektronik maupun cetak sering memuat berita kasus-kasus korupsi, baik korupsi yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Tindak korupsi inipun bermacam-macam modus yang digunakan oleh oknum untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Tindakan korupsi sering kali dilakukan secara kelompok guna saling menutupi kejahatan yang mereka lakukan, hal itu dilakukan karena korupsi di dalam suatu organisasi dimana organisasi atau lembaga itu berjalan sesuai fungsi yang terkait satu sama lain, sehingga ketika ingin melakukan sebuah upaya tindak pidana korupsi

diperlukan kerjasama dengan subsistem yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga.

Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi banyak menemukan kendala. Kendala yang dihadapi seperti pandangan masyarakat yang menganggap korupsi sebagai sebagai hal yang biasa dan sudah menjadi tradisi tokoh politik serta adanya intervensi dari partai politik. Ciri korupsi dapat dikenali seperti yang dikemukakan oleh Alatas (1983:12) yaitu, (1) korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, (2) korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah merajalela yang berakar, (3) korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, (4) mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya di balik membenaran hukum, (5) mereka yang terlibat korupsi adalah mereka

yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan tersebut, (6) setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.

Berbagai ciri yang sudah disebutkan sebenarnya korupsi merupakan masalah yang kuno dalam sejarah peradaban manusia, dan mempunyai tingkatan yang berbeda. Akan tetapi semua tindakan korupsi tidaklah dibenarkan, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan. Pada tahun 2013 Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melakukan pemantauan terhadap 184 perkara korupsi dengan 295 terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun Peninjauan Kembali (PK). Perkara yang terpantau tersebut berasal dari Pengadilan Tipikor (243 terdakwa), Pengadilan Tinggi (32 terdakwa), maupun Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK (20 terdakwa). Sebanyak 278 terdakwa kasus korupsi diajukan oleh Kejaksaan, sedangkan 17 terdakwa lainnya kasusnya berasal dari KPK. Dari 184 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah Rp 3,46 Triliun, nilai suap mencapai Rp 13,18 Miliar, jumlah denda Rp 36,95 Miliar, dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 515,55 Miliar. Dari 184 perkara korupsi, sebanyak 279 terdakwa (94,57%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 16 terdakwa (5,42%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan. Dari seluruh penjatuhan vonis bersalah untuk koruptor, lima besar hukuman paling dominan adalah 1 tahun penjara (78 terdakwa), 4 tahun (35 terdakwa), 2 tahun (28 terdakwa), 3 tahun (21 terdakwa) dan 1 tahun 6 bulan (19 terdakwa).

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa banyak sekali kejadian korupsi yang sudah diputus pada tahun 2013 itupun hanya kasus yang dipermukaan dan kasus yang lain sedang menunggu untuk terungkap. Kejadian yang demikian sudah sangat mengganggu stabilitas perekonomian bangsa dengan adanya elit politik yang korup, imbasnya adalah rakyat yang menjadi korban dalam hal ini, seperti tingkat kesejahteraan menurun.

Menurut Perrow (dalam Wibowo, 1989:25), korupsi dapat terjadi sebagai inisiatif dari seorang individu karena posisi. *feathering the nest* yaitu upaya untuk kepentingan atau mempromosikan diri sendiri dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dari kenaikan harga tersebut. Di lain pihak korupsi dapat juga terjadi sebagai akibat dari persetujuan yang dilakukan oleh pimpinan dengan pihak luar organisasi, dengan adanya *deal* tersebut pemimpin akan mendapat keuntungan untuk kepentingan diri sendiri.

Permasalahan korupsi di Indonesia kian lama semakin membrutal, bahkan berani masuk dalam ranah agama,

seperti korupsi pengadaan dana Al-Quran. Kondisi demikian sangat memperhatikan yang mana menunjukkan kualitas moral yang semakin merosot. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) yang disampaikan pada seminar dan diskusi publik di Universitas Airlangga Surabaya (12/03/2014) menunjukkan bahwa skor indeks korupsi di Indonesia adalah 32 dimana hampir mendekati negara miskin di Afrika, sedangkan hasil lain yakni Indonesia berada pada peringkat 114 dari 177 negara di dunia. Hal ini sungguh menjadi sebuah potret buram yang menghiasi perjalanan bangsa.

Menurut ICW, kasus-kasus korupsi hampir terjadi pada berbagai sektor di pemerintahan semisal, pengadaan simulator SIM Djoko Susilo, Dirlantas Polri dengan kerugian sebesar 121 Miliar. Kedua, suap kuota impor daging sapi Luthfi Hasan, Anggota DPR dengan kerugian 1,3 Miliar, lalu proyek di Kemempora dan Kemendiknas Anggelina Sondakh, Anggota DPR dengan kerugian sebesar 39,9 Miliar. Selanjutnya pelaksanaan Anggaran Dinas PU Deliserdang Faisal, Kadinas PU Kab Deliserdang dengan kerugian 98 Miliar, dan suap hakim kasus bansos Bandung Setyabudi Tejocahyono.

Keadaan yang demikian seharusnya menjadi ukuran KPK atau pihak terkait untuk berani dan tegas dalam tindak pidana korupsi. Semua pelaku korupsi yang sudah disebutkan pada data di atas merupakan orang-orang yang mempunyai atau pernah memperoleh pendidikan tinggi yang diharapkan mampu mempunyai integritas dan moral yang baik sesuai dengan Pancasila dan agama, sehingga menghindari jauh-jauh tindakan tercela yang demikian.

Kemudian pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berpedoman pada UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keberadaan KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam 3 memberantas tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi yang sulit dituntaskan membutuhkan solusi yang melibatkan masyarakat luas. Pemberantasan korupsi menurut KPK terbagi menjadi dua yaitu: tindakan represif dan preventif. Selain melalui mekanisme hukum (represif), juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal ini sebagaimana dikutip dari Kemendiknas (Agus Wibowo, 2012: 17) bahwa pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif. Itu karena pendidikan membangun generasi baru bangsa menjadi lebih baik. Keberhasilan penanggulangan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum saja. Tindakan preventif ini dimaksudkan bahwa korupsi dapat dicegah secara dini dengan menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah-

sekolah. Hal inilah yang kemudian mendorong KPK untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedari dini kepada generasi penerus bangsa. Dalam Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 dipaparkan bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Generasi muda harus diberikan pendidikan yang mengedepankan akhlak agar tidak melakukan tindakan korupsi yang akan merugikan negara nantinya.

Dalam praktiknya, korupsi sangat sukar untuk diberantas bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu, sangat sulit mendektaknya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlunya edukasi akan nilai antikorupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan.

Sebagai upaya pemberantasan korupsi, pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kini berjuang keras menangkap pelaku korupsi. Namun upaya pemberantasan dengan menangkap pelaku korupsi dirasa belum cukup. Pun, sosialisasi pemberantasan korupsi tidak cukup sekedar memberi pemahaman apa itu korupsi.

Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam pemberantasan korupsi, yakni pencegahan korupsi. Pencegahan menjadi bagian penting dalam program pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, pencegahan korupsi harus diajarkan disetiap jenjang pendidikan. Hal tersebut memiliki beberapa alasan, pertama, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. Kedua, pendidikan untuk membasmi korupsi sebaiknya berupa persilangan (intersection) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Ketiga, pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.

Supaya pendidikan anti korupsi tumbuh sejak dini, keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukanlah hal baru. Justru memiliki kedudukan strategis-antisipatif. Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat anti korupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi

melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan.

Secara psikologis, sifat ini dimiliki tiap anak. Hanya terelisasinya memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika sejak usia dini anak tidak dididik dengan baik, sifat negatif itu akan muncul. Secara akademik dan psikologis hal itu dibenarkan, tetapi jika dibiarkan akan berakibat fatal. Yang perlu diingat adalah bahwa pendidikan selalu membawa implikasi individual dan sosial. Secara individual, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan potensi, baik potensi jasmani, rohani, maupun akal. Pendidikan yang baik pastilah dapat mengembangkan potensi manusia tersebut secara bertahap menuju kebaikan dan kesempurnaan. Secara sosial, pendidikan merupakan proses pewarisan kebudayaan, berupa nilai-nilai perilaku dan teknologi. Semua itu diharapkan dapat diwariskan kepada generasi muda agar kebudayaan masyarakat senantiasa terpelihara dan berkembang.

Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi pasif, tetapi berupaya untuk melahirkan generasi yang mampu berkreasi untuk mengembangkan kebudayaan agar lebih maju dan berkembang kearah menuju lebih positif. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat intelektual serta wawasan yang dimiliki oleh peserta didik.

Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan harus implementasikan pendidikan antikorupsi sebagai pedoman siswa berkarakter disiplin dan bertanggung jawab, salah satunya melalui budaya sekolah. implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah tentunya tidak akan terlepas dari hambatan. Setiap perbuatan pasti akan ada rintangan yang menghalang, begitu juga dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Budaya Sekolah pasti akan ditemui hambatan-hambatan baik itu dari internal maupun eksternal.

Secara singkat, pendidikan memiliki tugas mulia untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang anti korupsi. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sangat mungkin dan efektif apabila dilakukan dilembaga pendidikan dimana anak-anak masih berada dalam usia dini. Dalam masa ini, anak sedang berproses membentuk karakter (character building). Pendidikan anti korupsi dapat digunakan untuk menanamkan kejujuran dan semangat tidak menyerah untuk mencapai kebaikan dan kesuksesan. Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Harapannya, setelah mereka dewasa (terutama jika menjadi pejabat) tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku materialistik, hedonistik, ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (dalam Wibowo, 2011:17), korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan secara tepat ruang lingkungannya. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (*subtle*) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi. Pada tingkat antar individu, korupsi dapat terjadi ketika salah satu individu melakukan penipuan (*cheating*) terhadap individu lainnya. Namun demikian, Kemdiknas tahun 2011 mencoba mendefinisikan korupsi sebagai istilah yang mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif.

Pendidikan di Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. manusia yang lahir berkembang melalui pendidikan adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Di saat institusi lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, Institusi pendidikan dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai antikorupsi. berbagai cara dengan melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral peserta didik. Pendidikan seharusnya dijadikan sebagai pilar paling depan untuk mencegah korupsi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) untuk masa yang akan datang sebagai wujud pendidikan memahami nilai-nilai kejujuran.

Menurut Suharsaputra (dalam Wibowo, 2012:35) pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan bangsa baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional maupun sebagai pembentuk karakter bangsa. Pendidikan mampu memberikan pencerahan disamping sarana transformasi dan humanisasi. Pendidikan mampu mentransfer perangai buruk menjadi mereka yang berkepribadian dan berkarakter buruk menjadi mereka yang berkepribadian dan berkarakter mulia.

Menurut Wibowo (2013:38) pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi

Menurut Nuh (dalam Wibowo, 2012:38) program pendidikan antikorupsi ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sebab, dengan begitu maka mereka akan terhindar dari berbagai macam sikap dan perilaku koruptif. Bahkan, ketika mendengar korupsi sudah alergi. Selanjutnya menurut Baho (dalam Wibowo, 2010:39) pendidikan antikorupsi bukan cuma berkuat pada pemberian wawasan dan pemahaman saja. Tetapi diharapkan dapat menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik, yakni membentuk sikap dan perilaku antikorupsi pada anak didik. Pengajaran pendidikan antikorupsi hendaknya menggunakan pendekatan yang sifatnya terbuka, dialogis dan diskursif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk rasa keingintahuan, sikap kritis dan berani berpendapat.

Dharma (2004) tentang tujuan pendidikan anti-korupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud (dalam Wibowo, 2012:45) terdapat nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam pendidikan anti korupsi

Tabel 1. Nilai-nilai yang Diinternalisasikan dalam Pendidikan Anti Korupsi

No	Nilai	Deskripsi
1.	Kejujuran	Perilaku yang di dasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat di percaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
2.	Kepedulian	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
3.	Kemandirian	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
4.	Kedisiplinan	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), negara dan tuhan yang maha esa.
6.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya

No	Nilai	Deskripsi
		sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
7.	Kesederhanaan	Bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati.
8.	Keberanian	Mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. (tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur.
9.	Keadilan	Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, dan proporsional

Pada tabel 1 disebutkan tentang nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam Pendidikan anti korupsi yang mana terdiri dari: (1) kejujuran, (2) kepedulian, (3) kemandirian, (4) kedisiplinan, (5) tanggung jawab, (6) kerja keras, (7) kesederhanaan, (8) keberanian, (9) keadilan. Model Pendidikan antikorupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah desain pendidikan antikorupsi yang secara konseptual dilaksanakan melalui budaya sekolah sebagai pelaksanaan pendidikan antikorupsi.

Berdasarkan hasil observasi awal di SMAN 1 Tarik menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek Kognitif yang dapat memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada siswa-siswi di SMAN 1 Tarik terhadap bahaya korupsi, sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pencegahan korupsi. Nilai antikorupsi di masukkan dalam mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama. Aspek afeksi akan berkorelasi dengan pembentukan sikap, kesadaran dan keyakinan bahwa antikorupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan siswa yang akan datang. Aspek psikomotorik akan memberikan keterampilan dan perilaku kepada siswa bagaimana mengenali bahaya korupsi. Keseluruhan aktivitas pendidikan ini akan memberikan pengalaman kepada siswa di SMAN 1 Tarik tentang pentingnya mengembangkan sikap, perilaku dan kebiasaan berorientasi kejujuran.

Di SMAN 1 Tarik Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui tingkat kejujuran siswa-siswi sudah dibentuk kantin kejujuran, Adanya kantin kejujuran akan melatih kejujuran siswa-siswi dalam membeli barang, makanan ringan dan minuman. Dalam kantin kejujuran di skenarioan bersifat *self service*, artinya tidak ada penjaga kantin yang bertugas melayani pembeli. Praktik

ini dilakukan untuk keberhasilan budaya sekolah sebagai contoh implementasi pendidikan antikorupsi. Selain itu budaya sekolah yang mendukung implementasi pendidikan antikorupsi dengan membiasakan agar para siswa-siswi memiliki rasa tanggung jawab, adil, dan tidak curang atau menyontek pada ujian sekolah serta pemberian *Reward* atau *Punishment* secara tegas.

Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan harus implementasikan pendidikan antikorupsi sebagai pedoman siswa berkarakter disiplin dan bertanggung jawab, salah satunya melalui budaya sekolah. implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah tentunya tidak akan terlepas dari hambatan. Setiap perbuatan pasti akan ada rintangan yang menghalang, begitu juga dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui Budaya Sekolah pasti akan ditemui hambatan-hambatan baik itu dari internal maupun eksternal. Sehubungan dengan hal itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah dan hambatan apa saja yang di alami sekolah sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 Tarik".

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui budaya sekolah di SMA Negeri 1 Tarik? (2) Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 Tarik

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui budaya sekolah di SMAN 1 Tarik. (2) Mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Pendidikan Antikorupsi melalui budaya sekolah di SMAN 1 Tarik.

Mengingat masalah yang timbul sehubungan dengan model pendidikan antikorupsi, maka dari uraian masalah yang berhasil diidentifikasi adalah bagaimana budaya sekolah sebagai pengetahuan tingkat kedisiplinan siswa dan tanggung jawab siswa dalam implementasi pendidikan antikorupsi di SMAN 1 Tarik. Kemudian mendeskripsikan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan Pendidikan antikorupsi di SMAN 1 Tarik Sidoarjo

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara luas dan mendalam dengan berbagai kondisi yang ada dan situasi yang muncul di

masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) akan menghasilkan data kualitatif berupa pemahaman dari subjek studi. Menurut Reinharz, (dalam Pujianto, 2009:17) bahwa metode kualitatif dapat memberikan data luas dan mendalam, karena adanya peluang bagi peneliti dan informan untuk berinteraksi secara leluasa dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yang menurut Stake (dalam Creswell, 2010:20) adalah strategi penelitian dimana peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok individu. Penelitian ini menggambarkan secara mendalam bagaimana aktivitas/program SMAN 1 Tarik dalam Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah.

Lokasi penelitian ini menggali pada Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah di SMAN 1 Tarik, Jl Raya Janti Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Waktu penelitian dilakukan dari awal (pengajuan judul) sampai pada hasil akhir (hasil penelitian) sekitar 12 bulan yaitu dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei 2018.

Dalam penentuan informan penelitian tentang implementasi Pendidikan antikorupsi melalui budaya ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2015:85) *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan teknik ini beralasan bahwa sampling yang *Purposive* merupakan sampling yang telah dipilih dengan baik sesuai dengan kebutuhan atau relevan dengan penelitian. Dalam konteks ini, kriteria informan dalam penelitian ini yakni ; Mengetahui, peneliti memilih orang-orang yang menurut peneliti mengetahui secara betul proses dalam implementasi Pendidikan antikorupsi. Kedua yakni informan terlibat langsung dalam proses tersebut. Ketiga, memiliki pemahaman visi dan misi sekolah dengan baik

Instrumen penelitian tidak bisa dipisahkan dalam suatu penelitian dan bagian yang harus ada dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti. Maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana. Peneliti akan terjun sendiri ke lapangan sampai dengan pembuatan kesimpulan (Sugiyono, 2011:233).

Lembar observasi yang digunakan adalah menyangkut observasi kegiatan peserta didik dalam sekolah. Lembar observasi tersebut diisi sesuai dengan kegiatan peserta didik yang terjadi di SMAN 1 Tarik baik

saat proses pembelajaran maupun tidak, Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk mewawancarai informan terkait. Data hasil observasi dan hasil wawancara, maka dapat ditemukan data untuk mengetahui Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab Satori dan Komariah (2013:105). Wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara secara langsung atau dengan cara *face to face* tatap muka secara langsung dengan dilengkapi pedoman wawancara. Adapun materi atau instrument yang diajukan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana bagaimana pengimplementasian Pendidikan antikorupsi melalui budaya dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya tersebut. Kemudian hasil dari wawancara tersebut disalin dalam catatan untuk menghindari adanya resiko kehilangan data atau informasi hasil wawancara.

Data dalam penelitian ini merupakan paparan lisan, tertulis, dan perbuatan yang menggambarkan Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah. Data yang dikaji dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara lengkap untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2011:140). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan berdialog pada sejumlah informan yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, guru Penjaga kantin dan perwakilan peserta didik kelas 10 dan 11 dengan memberikan pertanyaan tentang Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah di SMAN 1 Tarik.

Hasil wawancara dengan informan dicatat untuk menghindari kemungkinan tertukarnya informasi antara informan yang satu dengan yang lain. Wawancara yang dilakukan disertakan alat perekam suara dengan tujuan untuk mengantisipasi informasi yang terlewatkan. Wawancara dilakukan dengan bertanya pada sejumlah informan yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, Guru dan peserta didik maka

dapat diperoleh hasil penelitian mengenai Implementasi pendidikan antikorupsi beserta faktor pendukung, penghambat dan upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah di SMAN 1 Tarik.

Adapun pada penelitian ini menggunakan *observasi non-partisipan* yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono. 2011:145). Observasi yang digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi dan situasi di lapangan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini tentang kegiatan-kegiatan yang menunjukkan Implementasi pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah di SMAN Tarik. Dengan melakukan pengamatan secara langsung tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi maka dapat diperoleh hasil penelitian lapangan sesuai dengan fakta. Observasi yang dilakukan disertakan alat bantu kamera untuk memotret kegiatan peserta didik, sehingga akan lebih memperkuat data yang dihasilkan.

Selanjutnya dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2011:240). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang berupa profil sekolah, visi, misi dan tata tertib sekolah guna mendukung data terkait Implementasi Pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah SMAN 1 Tarik. Dokumentasi juga dilakukan dengan menggunakan alat perekam kamera untuk mendapatkan foto hasil kegiatan di lapangan sehingga lebih memperkuat data hasil observasi dan hasil wawancara.

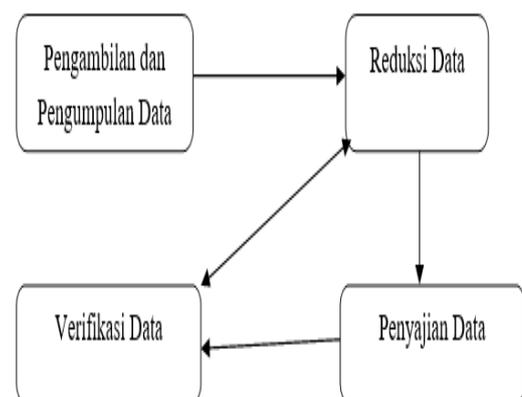
Teknik analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya. Data yang telah didapat dari pengumpulan data dideskripsikan dan di analisis sesuai dengan pengamatan, wawancara, maupun dokumen yang diperoleh. Analisis data terdiri dari tiga alur yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses keleluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. (Sugiyono 2014:249). Alur kedua adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian. Alur ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2015:253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Hubberman. Maksud analisis data model interaktif, yaitu pada teknik ini ada 3 tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahap pertama, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data ini merupakan bentuk analisis yang berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data mana yang relevan dan data mana yang tidak relevan dengan penelitian. Reduksi atau proses transformasi ini berlanjut sesudah penelitian lapangan hingga laporan akhir tersusun. Data dan laporan kemudian dirangkum dan kemudian dipilah-pilah pada hal yang pokok untuk dipilih atau difokuskan lalu dicarikan tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap tersebut data dipilih dan disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memudahkan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan.

Tahap kedua, melalui penyajian data akan diperoleh deskripsi atau gambaran bentuk penggabungan informasi yang tersusun dari keseluruhan atau bagian-bagian data tertentu dari lapangan secara lebih menarik dan akurat. Tahap ketiga, dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus, maka dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat *Grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus menerus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Proses analisis data tersebut dapat dilihat melalui gambar di bawah ini:



Gambar 1. Proses Analisis Data Miles & Hubberman

Pada penelitian ini untuk metode keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, akan tetapi pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Triangulasi dibedakan menjadi empat bagian yaitu dengan sumber data, metode, penyidik dan teori. (Moleong, 2011:330)

Keabsahan data menurut Sugiyono (2014:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dari ketiga triangulasi tersebut yang digunakan hanya triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Jenis triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu data informasi yang diperoleh menggunakan alat dan waktu yang berbeda. Penelitian ini memanfaatkan pemeriksaan melalui sumber data. Hal itu dapat dicapai dengan cara : (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara kepada informan , observasi dan dokumentasi, dapat diperoleh data berupa kata secara lisan maupun data dalam bentuk dokumentasi. Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian yang disusun sesuai dengan inti dari permasalahan yang diangkat pada rumusan masalah.

Informan G adalah informan pertama yang mana ia merupakan kepala SMAN 1 Tarik. Dalam keorganisasian sekolah peran dan tanggung jawab kepala sekolah sangatlah besar. Ia sudah menjabat sebagai kepala sekolah selama 3 tahun. Maka dari itu dalam penelitian ini kepala sekolah akan banyak diwawancara secara mendalam guna mendapat hasil yang akurat terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi. Mengenai implementasi pendidikan antikorupsi di SMAN 1 Tarik ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu wabah yang sangat sulit untuk "disembuhkan".

"Jika kita melihat berita di berbagai media massa selalu ada berita-berita yang muncul mengenai kasus korupsi. Tersangka kasus korupsinya pun tak pandang bulu, baik pejabat kelas eselon hingga elit sekalipun. Sehingga hal tersebut sangat memukul nurani kita. Hal tersebut seolah penyakit yang menjangkiti siapa saja".

Bagi G sendiri ia memberikan pendapatnya bahwa korupsi seolah-olah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Kejahatan tersebut dianggap bukan kejahatan yang luar biasa. Para pelaku atau bahkan tersangkanya pun merasa biasa saja dan bahkan cenderung membela diri. Ia melihat dalam media televisi para pelaku yang tidak menunjukkan ekspresi malu dan sedih, justru sebaliknya ekspresi yang dilihatnya ada yang tersenyum dan ada sebagian yang emosional menunjukkan pembelaan. Ia juga menambahkan bagaimana kondisi masa mendatang jika kita tidak mendidik siswa dengan baik dan benar maka yang terjadi akan semakin parah dan menimbulkan generasi yang korup.

"Kalau mas melihat sendiri biasanya di media televisi itu para pelaku-pelaku atau tersangkanya "mesam-mesem" kayak gak punya dosa. Itu kan kejahatan dan memalukan. Ada banyak juga yang sok ngotot mbela dirinya, merasa didholimi"

Melihat para koruptor ia juga berkomentar bahwa korupsi adalah budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Karena budaya merupakan hal yang biasa dilakukan dan berulang-ulang sehingga menjadi habit. Maka dari itu pendidikan korupsi sangatlah penting diterapkan kepada siswa-siswi di semua kalangan dari jenjang dasar hingga tinggi. Budaya yang semacam itu tidak boleh dibiarkan. Ia menambahkan pula bahwa anak-anak atau remaja masih bisa untuk dibiasakan berlaku jujur sehingga kelak mereka akan memiliki nilai-nilai kebaikan pula. Dalam mencegah budaya korupsi sekolah SMAN 1 Tarik memiliki visi dan misi yang diterapkan dalam proses pembelajaran.

"Sekolah dimanapun pasti memiliki visi dan misi sebagai rel atau fondasi dalam menjalankan kehidupan sekolah. Visi misi sekolah tidak boleh hanya sebatas di tempel pada tembok atau poster di lingkungan sekolah, melainkan harus diterapkan dalam kurikulum sekolah bahkan proses belajar mengajar yang dimasukkan dalam RPP."

Membahas tentang visi dan misi sekolah tentu bukan hal yang sepele, namun hal itu merupakan bagian penting karena jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas maka sekolah tersebut patut dipertanyakan. Visi dan misi di SMAN 1 Tarik yakni menekankan pada sikap dan moral value seperti kejujuran dan kecerdasan. Visi dan

misi tersebut dipilih karena melihat kondisi moral bangsa yang semakin merosot. Hal tersebut tentu tidak diinginkan oleh siapapun termasuk para pendidik di SMAN 1 Tarik. Dalam proses pembelajaran di SMAN 1 Tarik menerapkan sistem "zero score".

"Visi dan misi sekolah yang menekankan kejujuran di sini ini tidak serta merta konsep belaka atau konsep teori. Akan tetapi ada hal unik di SMAN 1 Tarik ini yaitu menerapkan sistem "zero score" maksudnya gini mas, jika siswa ketahuan melakukan tindakan nyontek pada saat ulangan maka akan mendapat nilai 0 dan panggilan orang tua."

Dalam pelaksanaan sistem *zero score* G mengatakan hal tersebut memang baru diterapkan satu tahun ajaran lalu 2017/2018. Menurutrnya awalnya memang menuai banyak protes dari siswa yang mana memang belum terbiasa oleh aturan baru tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka sudah mulai terbiasa. Hal tersebut dinilai penting karena pendidikan mulai membiasakan anak untuk jujur di hal yang kecil sekalipun. Disisi lain orang tua sangat menyambut hal tersebut dengan baik. Program tersebut dikatakan akan membawa dampak positif dikemudian hari. Mengingat budaya korupsi muncul karena tidak ada pembiasaan yang baik maka yang terjadi adalah budaya yang tidak jujur.

Lebih lanjut lagi ketika pembelajaran berlangsung guru memulai pembelajaran dengan memutar video pendek terkait dengan kasus korupsi dan sebagian guru lain memulai dengan menyanyikan lagu-lagu nasional atau perjuangan. Hal tersebut sudah diterapkan 2 tahun terakhir. G menuturkan bahwa hal tersebut dilakukan karena akan membuat siswa dan siswi merasa dan memiliki sense nasionalisme dan menghindari tindak korupsi di masa mendatang.

"Di sini mas selain visi dan misi terkait dengan kejujuran yang diimplementasikan melalui zero score diterapkan pula model pengajaran yang setiap guru diharuskan memutar video pendek terkait korupsi atau menyanyikan lagu nasional. Tujuannya mas yakni supaya anak ingat terus apa yang tidak boleh dilakukan."

Selain hal atau paparan di atas ternyata ada hal yang membuat implementasi Pendidikan antikorupsi tersebut berjalan dengan baik. Dukungan tersebut selain berasal dari orang tua yang sudah disebutkan di atas, maka hal kedua yakni seluruh warga sekolah memiliki komitmen dan semangat Bersama untuk sama-sama memberikan contoh dan membudayakan kejujuran di lingkungan sekolah. Selain itu adanya anggaran dana internal turut andil untuk melakukan kerjasama-kerjasama atau pelatihan-pelatihan terkait Pendidikan antikorupsi.

"Keberhasilan tersebut sebenarnya didukung oleh pihak-pihak yang benar-benar memiliki komitmen mas, misalnya orang tua yang seperti tadi itu. Terus guru-guru di sini komitmennya kuat dan konsisten. Di tambah lagi sekolah ada sedikit anggaran untuk Pendidikan antikorupsi tersebut"

Informan kedua yakni guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sehubungan dengan mata pelajaran yang diampu maka pembelajarn PPKn yang diampu sangat menekankan pendekatan pada pendidikan antikorupsi. Dalam setiap mengajar ia sering membuat game tentang pendidikan antikorupsi. Selain itu siswa sering diajak untuk membuat sloga terkait dengan antikorupsi.

"Kalau saya sangat menyukai mengajar PPKn mas soalnya langsung berkaitan dengan kewarganegaraan dan nasionalisme. Bangsa ini tidak membutuhkan mental-mental yang korup. Siswa harus paham dan mengampanyekan secara langsung tentang pendidikan antikorupsi."

Bu N menambahkan pula bahwa untuk memantapkan dan lebih memberikan dampak terhadap siswa Bu N memodifikasi sistem *zero score*, maka beliau menerapkan pula *no plagiarism*. Setiap tugas dan artikel jika tidak ada sumber atau tanpa mencantumkan sumber maka tidak akan dinilai. Hal tersebut memang perlu dimiliki untuk penghargaan atas jeri payah orang lain dan menekankan sikap yang senantiasa hati-hati.

Selain itu Bu N sebelum memulai pengajaran dengan memutar video pendek terkait kasus-kasus korupsi yang sedang hangat dibicarakan dan kemudian memberikan refleksi-refleksi untuk kemudian di diskusikan. Hal tersebut akan memberikan lesan yang kuat terkait dengan nilai-nilai moral yang baik. Bahkan karena pedulinya Bu N dalam suatu kesempatan memberikan semacam seminar yang langsung memanggil salah satu pembicara dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memberikan wawasan tambahan dan gambaran nyata mengenai kasus-kasus korupsi di Indonesia.

"Jadi ini saya juga tidak serta merta memberikan pelajaran dari diri saya sendiri mas tapi ada seminar 2 tahunan terkait korupsi yang menggandeng KPK supaya anak-anak lebih mampu dan sebagai langkah antisipasi dimasa depan."

Antusiasme warga sekolah maupun orang tua sangat tinggi karena acara yang diselenggarakan ini juga mengajak orang tua untuk hadir. siswa juga merasa senang dan dapat meliha langsung petugas yang pernah menangani atau bahkan menangkap para koruptor.

Dengan demikian pengalaman siswa, orang tua, dan bahkan guru semakin bertambah.

Selain tentang paparan tersebut, ada hal yang ternyata menjadi sedikit penghambat dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan antikorupsi ini. Hal tersebut yakni tidak semua siswa menyambut dengan baik hal itu bias dibuktikan bahwa pemberian *zero point* bagi siswa yang mencontek mendapat protes karena dianggap terlalu berlebihan. Kedua periodisasi kerjasama dengan KPK masih terlalu Panjang jangka waktunya yakni 2 tahun, idealnya adalah kegiatan tahunan. Selanjutnya yakni perhatian pemerintah setempat dalam kerjasama di bidang Pendidikan antikorupsi.

Informan ketiga merupakan informan yang bersentuhan langsung dengan siswa siswi. ia merupakan waka kesiswaan dan guru BK di SMAN 1 Tarik. Beliau sudah mengajar selama 18 tahun. Beliau merupakan sosok yang sangat disiplin dan tegas. Para siswa banyak diajarkan tentang bagaimana cara berperilaku dan berinteraksi dalam bermasyarakat melalui berbagai macam kegiatan guna membentuk karakter para siswa-siswi di SMAN 1 Tarik.

Dari segi kebijakan yang diterapkan di sekolah ini sangatlah tegas. banyak aturan yang menekankan siswa untuk senantiasa bertindak disiplin dan penuh kejujuran. Para siswa diharuskan datang sebelum pukul 07.00 pagi. Apabila ada siswa yang datang terlambat maka konsekuensinya adalah dihukum membuat poster atau slogan tentang antikorupsi dan dikampanyekan di lingkungan SD terdekat. ide tersebut muncul dan sudah diterapkan selama 1 tahun terakhir.

“Di SMA sini hukuman tidak hanya persoalan membuat efek jera saja melainkan memberikan dampak yang baik di lingkungan sekitar. seperti untuk siswa yang datang terlambat mereka akan melakukan kampanye dengan poster yang mereka buat sendiri di SD terdekat.”

Sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan muncullah gagasan untuk memodifikasi kantin kejujuran yang selama ini sudah ada namun belum memberikan efek yang besar bagi anak karena masih kurang diminati dan kesusahan untuk memperoleh uang kembali. Kemudian model kantin keuruan iniun dimodifikasi dengan menambah banyak uang receh dan model pelayanan voluntir. jadi jika ada banyak siswa maka mereka diaari secara sukarela untuk membantu beberapa saat dan kemudian berganti dengan siswa yang lain yang kebetulan saat itu melakukan transaksi pembelian pula.

“Jadi di SMA ini kantin kejujuran sebenarnya sudah sama seperti SMA lainnya. namun, dalam pelaksanaannya agak sedikit berbeda yakni pertama ada box uang receh yang tak

dijaga. selain itu jika ada pembeli bergerombol maka siswa yang sebagai pembeli juga didik untuk menjadi relawan untuk membantu melayani namun bergiliran dan bergantian dengan pembeli lain.”

Jika demikian maka menurut informan E Pendidikan antikorupsi di sekolah ini dalam segi pelaksanaannya sudah baik. Maka kemudian ada hal yang perlu digali yakni faktor penghambat yang mungkin ditemui. Berdasarkan keterangan informan E yakni ada beberapa faktor yang penghambat, faktor penghambat pelaksanaan implementasi Pendidikan antikorupsi ini yakni pertama anggaran sekolah yang dirasa masih kurang. Kedua kerjasama dengan KPK periodesasinya masih 2 tahunan, seharusnya tiap tahun. Ketiga kurangnya perhatian pemerintah setempat dalam kerjasama di bidang Pendidikan antikorupsi. Hal itu senada dengan informan N.

Inisial S adalah mantan penaga kantin sebelum ada kantin kejujuran dibuka. kini ia bekerja sebagai tukang kebun dan menghitung hasil untung rugi kantin kejujuran setelah siswa pulang. Selama kantin kejujuran dibuka ada kerugian yang sangat kecil di awal-awal tidak sampai mencapai Rp. 15.000 dikarenakan mungkin ada siswa yang teledor dalam uang kembalian. dalam mengecek barang-barang pun hanya barang yang berbentuk kecil seperti permen dan coklat kecil yang mengalami ketidaksesuaian. hal itu dimungkinkan masih ada beberapa tangan yang jail.

“Ya ketika saya awal-awal ngecek uang dan barang ada rugi dan beberapa barang yang kecil ada yang hilang tapi jumlahnya gak banyak mas. ya maklumlah anak jahil itu pasti ada.”

Ketika istirahat berlangsung terkadang ia melintas sekitar kantin jalanan hanya untuk sekedar melihat. ia meliha bahwa antusias siswa dari tahun ke tahun meningkat dan tidak canggung membeli atau malas membeli di kantin kejujuran. tentu hal tersebut sangat positif. siswa diajarkan untuk melayani dirinya sendiri dan tanpa ada yang mengawasi terkait keuangan. keuangan merupakan hal yang sangat riskan. bersentuhan dengan keuangan inilah yang biasanya para koruptor akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri.

Sebagai bagian dari warga SMAN 1 Tarik, DH sangat memahami betul nilai-nilai dan aturan apa yang ada di SMA tersebut. DH saat ini duduk di bangku kelas XI IPS. ia mengatakan bahwa iklim yang disiplin dan jujur sangat ia rasakan saa menimba ilmu di sini.

“Iya kak di sini aku sangat nyaman. disini banyak sekali aturannya tapi itu semua melaih kedisilinan dan keuruan kita. ya sekolah kan memang seharusnya seperti itu.”

Selama ia bersekolah disini di awal kelas X lalu ia pernah mendapat sanksi akibat dari ia datang ke sekolah terlambat. Karena ia terlambat ia diharuskan menjalani hukuman berupa membuat poster dan mengkampanyekan ke SD terdekat. Ia awalnya menganggap itu hal yang aneh namun setelah direnungkan hal tersebut memiliki manfaat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, selanjutnya dapat dikategorisasikan ke dalam tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 seperti di bawah ini:

Tabel 2. Implementasi Budaya Antikorupsi

No	Implementasi
1	Penyuluhan tentang bahaya korupsi bagi peserta didik baru.
2	Menindak secara tegas bagi siswa yang melakukan perbuatan curang ketika ujian.
3	Menyisipkan materi pendidikan antikorupsi ke dalam mata pelajaran
4	Memberikan tugas kepada siswa dengan soal yang berbeda.
5	Memberikan pembekalan berupa tindakan preventif pada siswa mengenai bahaya korupsi.
6	Menindak secara tegas siswa yang melanggar peraturan.
7	Mengikuti penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi.
8	Menyesuaikan diri dengan kurikulum yang berlaku di sekolah.
9	Berperilaku jujur dalam berbagai perbuatan di lingkungan sekolah.

Implementasi budaya antikorupsi yang dilakukan di SMAN 1 Tarik dilakukan melalui beberapa program seperti yang tertera pada tabel. Namun dari beberapa pendapat yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa implementasi yang dilakukan lebih berfokus pada kegiatan penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan dengan tujuan agar tertanam jiwa antikorupsi bagi siswa sejak awal masuk sekolah.

Tabel 3. Faktor Pendukung Budaya Antikorupsi

No	Faktor-pendukung
1	Visi dan misi yang dimiliki jelas.
2	Antusiasme warga sekolah sangat tinggi.
3	Menggunakan kurikulum 2013 sebagai acuan untuk kegiatan belajar mengajar.
4	Sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
5	Adanya dukungan penuh orang tua siswa.
6	Adanya dukungan dari berbagai organisasi yang terdapat di sekolah.
7	Interaksi antara guru dan siswa terjalin baik.
8	Sebagian besar siswa memiliki antusias yang tinggi.
9	Tersedianya ekstrakurikuler sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, berperilaku disiplin serta sesuai aqidah.
10	Tersedianya kantin kejujuran di sekolah.

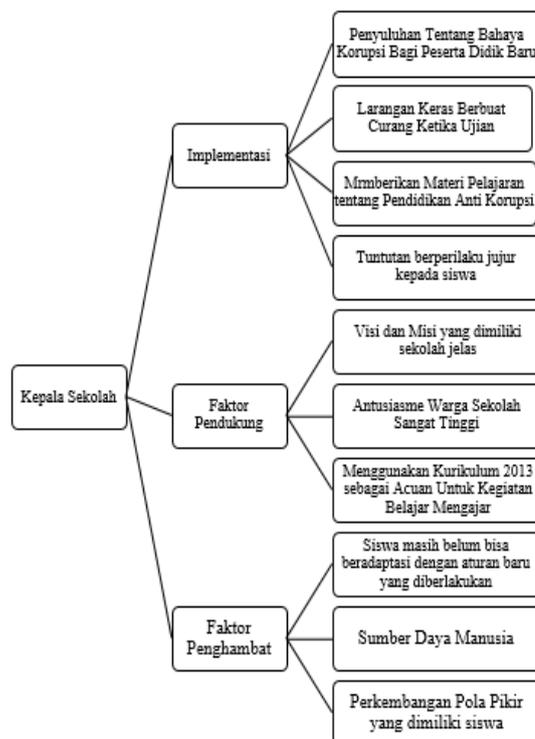
Berkaitan dengan faktor pendukung, faktor yang paling utama dalam implementasi pendidikan antikorupsi adalah visi dan misi sekolah sangat jelas, antusiasme warga sekolah yang tinggi, adanya ekstrakurikuler sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan adanya dukungan penuh dari orang tua.

Tabel 4. Faktor penghambat Budaya Antikorupsi

No	Faktor-penghambat
1	Siswa baru belum terbiasa dengan aturan yang berlaku.

No	Faktor-penghambat
2	Masih terdapat orang tua siswa yang mengajukan complain terkait dilaksanakannya kurikulum 2013.
3	Terdapat siswa yang belum sepenuhnya memahami arti penting pendidikan antikorupsi.
4	Masalah jatah pembagian jam tatap dengan siswa.
5	Perkembangan pola pikir siswa yang cenderung terbawa pergaulan di luar lingkungan sekolah.
6	Perbedaan karakter tiap individu siswa.
7	Pandangan miring siswa di terapkannya pendidikan antikorupsi.

Berkaitan dengan faktor penghambat, maka yang menjadi faktor utama adalah SDM sekolah kemudian diikuti dengan siswa yang belum beradaptasi dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Pada tabel 2 sampai dengan tabel 4 telah dipaparkan mengenai hasil rangkuman kegiatan wawancara antara informan dengan peneliti. Dengan demikian diketahui budaya antikorupsi berperan besar untuk mendukung implementasi budaya antikorupsi dan bahwa faktor pendukung memiliki jumlah yang lebih besar daripada faktor penghambat karena dilihat dari jumlah point yang tertera ditabel. Jika dipersingkat maka bagan hasil dari penelitian ini terdapat pada bagan bawah ini:



Gambar 2. Bagan Hasil Penelitian

### Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, untuk melihat hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi. SMAN 1 Tarik sebagai sekolah yang memiliki keunggulan riset dengan visi terwujudnya insan cerdas, unggul, dan peduli

lingkungan hidup turut menerapkan Program Pendidikan Anti Korupsi. Tujuannya adalah menanamkan nilai dan sikap hidup anti korupsi kepada siswa, menumbuhkan kebiasaan perilaku anti korupsi, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tidak terkotak-kotak ke dalam satu mata pelajaran. Pendidikan anti korupsi juga terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap, dan kebiasaan siswa. Untuk itu, dukungan kultur dan iklim sekolah sangat dibutuhkan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan karakter siswa. Berdasarkan data yang disajikan, perlu adanya analisis untuk dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan, yaitu mengenai implementasi program pendidikan anti korupsi, faktor pendukung dan penghambat program pendidikan anti korupsi, dan hasil adanya program pendidikan anti korupsi terkait dengan penerapan nilai-nilai dalam prinsip anti korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, maka peneliti mencoba memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang sudah diteliti.

Fenomena korupsi di negeri ini seolah menjadi masalah yang wajar ditemukan, pasalnya sering terungkap dan indikasi tindak kejahatan korupsi melalui pemberitaan baik media elektronik maupun cetak sering memuat berita kasus-kasus korupsi, baik korupsi yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Tindak korupsi inipun mempunyai bermacam-macam modus yang digunakan oleh oknum elit politik guna memenuhi kebutuhan pribadinya.

Aksi-aksi korupsi sering kali dilakukan secara kelompok dan individu guna saling menutupi kejahatan yang mereka lakukan, hal itu dilakukan karena korupsi di dalam suatu organisasi dimana organisasi atau lembaga itu berjalan sesuai fungsi yang terkait satu sama lain, sehingga ketika ingin melakukan sebuah upaya tindak pidana korupsi diperlukan kerjasama dengan subsistem yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga.

Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi banyak menemukan kendala, akan tetapi ciri-ciri korupsi dapat dikenali seperti yang dikemukakan oleh Alatas (1983:12) bahwa korupsi mempunyai ciri sebagai berikut, (1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, (2) Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarhasiaan, kecuali ia telah merajalela yang berakar, (3) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, (4) Mereka yang mempratekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya di balik pembenaran hukum, (5) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi

keputusan tersebut, (6) Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.

Keadaan demikian memanglah benar adanya karena hasil dari wawancara dengan informan mengatakan akar permasalahan korupsi yakni budaya atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara sistematis. selain itu budaya malu dan cinta tanah air sudah tidak dimiliki oleh para koruptor sehingga mereka mengesampingkan kehidupan orang banyak dan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Guru memiliki banyak sekali kreativitas dalam mengembangkan rancangan pembelajaran-pembelajaran antikorupsi yang terintegrasi dalam berbagai proses pembelajaran baik pembelajaran melalui mata pelajaran maupun non mata pelajaran untuk menanamkan karakter atau nilai-nilai kejujuran pada siswa-siswinya. Rancangan pembelajaran antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran mata pelajaran berguna untuk menanamkan karakter kejujuran secara jelas dapat dilacak dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Guru dapat membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

Penanaman berbagai macam nilai antikorupsi dalam kurikulum di SMAN 1 Tarik diantaranya yakni pertama, visi dan misi kejujuran menjadi prioritas utama. Nilai-nilai kejujuran didasarkan pada upaya menjadikan para siswa sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Ukuran yang dijadikan sebagai dasar yakni adanya sistem *zero score*.

*Zero score* diterapkan disemua mata pelajaran. istilah tersebut bermaksud memberikan nilai atau skor 0 kepada siswa yang mencontek dan yang melakukan pengutipan karya tanpa mencantumkan sumber. hal tersebut dilakukan karena kebiasaan positif akan menimbulkan kesan dan pandangan yang baik dalam kehidupan para siswa kelak.

Kedua, yakni tentang kedisiplinan, Perilaku siswa yang menunjukkan tindakan tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan di sekolah, dalam hal ini SMAN 1 Tarik maka ada beberapa indikator untuk melihatnya seperti disiplin dalam masuk kelas saat bel masuk kelas; disiplin ketika siswa berada di dalam kelas. jika aturan tersebut tidak dilakukan oleh siswa-siswi di sekolah tersebut maka konsekuensinya adalah hukuman berupa panggilan orang tua.

Upaya untuk mengatur kehidupan maupun sosial pelajar perlu hidup disiplin. Hidup disiplin adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial sekolah. Manfaat dari pola hidup disiplin ialah dapat mengatur waktu dengan baik agar

memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kedisiplinan siswa sudah diatur dalam tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah yang di dalamnya mencakup tentang pemakaian seragam, waktu belajar siswa, dan perilaku siswa. Untuk siswa yang membawa kendaraan ke sekolah, ia harus menuntun nya saat sudah memasuki gerbang, kendaraan dituntun hingga memasuki parkir. Jika siswa tidak disiplin maka akan mendapatkan sanksi berupa point. Kemudian sanksi tersebut akan dilanjutkan dengan pemanggilan orang tua. Untuk itu siswa harus disiplin dan menaati peraturan. Selain untuk siswa kedisiplinan juga untuk guru. Guru mengajar sesuai dengan jam nya, kemudian apabila guru tersebut ada suatu hal mendesak maka ia akan membuat kesepakatan dengan siswa. Misalnya masuk kelas terlambat 10 menit, maka akan ditambahi 10 menit saat seharusnya jam pelajaran berakhir.

Selama pelaksanaan hal tersebut sudah efektif, dimana siswa-siswi yang melakukan pelanggaran menunjukkan jumlah yang tidak banyak. hal tersebut memang pembiasaan yang baik dan harus terus dilakukan karena karakter tidak bisa dibentuk secara instan. karakter adalah proses dimana jika proses itu berhasil maka kan terbentuk karakter yang baik dan menadi kebiasaan baik.

Adapun hal implementasi Pendidikan antikorupsi yang menjadi bagian dari proses Pendidikan maka ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Dalam konsep pembelajaran Albert Bandura maka proses belajar harus ada beberapa poin yakni perhatian, maksud dari perhatian ini adalah siswa memberikan bentuk keseriusan dan memerhatikan setiap petunjuk atau aturan sekolah dan aturan dari guru mapel. Kedua yakni mengingat, dalam hal ini siswa mengingat setiap aturan dan instruksi yang diberlakukan oleh sekolah maupun guru. Ketiga yakni produksi. Produksi dalam hal ini siswa didikin untuk memiliki *output* yang baik dan menciptakan lingkungan yang sesuai aturan dan implementasi Pendidikan antikorupsi ini. Terakhir yakni motivasi, motivasi dalam hal ini siswa memiliki semangat yang kuat untuk menerapkan Pendidikan antikorupsi di sekolah tersebut.

Kantin adalah salah satu objek transaksi jual beli di lingkungan sekolah. sara kantin yang didapati diberbagai sekolahnya biasanya di jaga oleh pemilik kantin masing-masing. hal tersebut merupakan bentu pengawasan langsung kepada para pembeli. namun, berbeda dengan kondisi kantin yang ada di SMAN 1 Tarik. Di sekolah tersebut kantin tidak ada yang menjaga. Maka dari itu di kantin sekolah tersebut dikenal sebagai kantin kejujuran.

Konsep kantin kejujuran sebenarnya sudah sedikit lama diterapkan di sekolah-sekolah, namun ada beberapa sekolah yang tidak menerakan. di SMAN 1 Tarik ini konsep kantin kejujurannya berbeda dengan kantin

kejujuran lainnya. Di sini siswa disuguhkan sekotak uang receh untuk kembalian yang tidak ada yang menjaga pula. selain itu lokasinya diletakkan di tempat yang sedikit jauh dari keramaian. Hal tersebut bukan tanpa alasan. kasus-kasus tindak pidana korupsi sebgaiian besar dilakukan karena godaan uang dan adanya kesempatan dalam hal ini hukum yang lemah.

Fakta yang demikian yang membuat sekolah ini memiliki ide kantin berada di lokasi nyang jauh keramaian serta ketersediaan uang kembalian yang banyak. Hal tersebut melatih sikap dan mental jujur dikalangan siswa-siswi SMAN 1 Tarik. Hasilnya pun sangat bagus, tindak kecurangan un berangsur-angsur menurun jumlahnya. tentu hal tersebut adalah bagian dari proses penanaman pendidikan karakter antikorpsi.

Jika kantin kejujuran tidak dimodifikasi maka akan kurang memberikan dampak. Karena saat ini kejujuran mulai dilupakan dan dianggap tidak penting. Untuk senantiasa menjaga agar tetap siswa jujur dan disiplin maka evaluasi terhadap kantin kejujuran dievaluasi tiap semester.

Selain faktor yang mendukung Pendidikan antikorupsi di SMAN 1 Tarik, maka ada hal yang harus diperhatikan yakni ada faktor yang menghambat dalam implementasi Pendidikan antikorupsi tersebut. Hal itu terjadi karena karakter dan Pendidikan yang sifatnya mengubah mental tidaklah langsung atau secara instan berhasil. Kultur budaya yang baik dapat tumbuh karena proses yang panjang dan butuh adaptasi agar siswa lebih terbiasa dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran.

Dalam hal ini ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi Pendidikan antikorupsi. Pertama, tidak semua siswa dalam hal ini yang menjadi subjek terdidik menerima aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, seperti peraturan tentang larangan mencontek. Kemudian masih terdapat beberapa siswa menganggap kalau aturan itu terlalu berlebihan untuk anak di usia mereka. Hal itu tentu suatu proses sehingga sekolah tetap akan menerapkan aturan tersebut apapun responnya.

Kedua, anggaran sekolah yang belum memadai, serta sarana dan prasarana belum sepenuhnya berfungsi, padahal pendidikan antikorupsi menjadi prioritas utama setelah gerakan anti narkoba yang ada di sekolah tersebut. Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah ini sudah diterapkan sejak kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2013/2014 hingga sekarang. Namun di awal pelaksanaan, anggaran belum di tambah secara signifikan. Padahal banyak sekali program-program yang dilakukan untuk implementasi pendidikan antikorupsi ini. Sehingga program yang memerlukan dana besar belum terlaksana.

Ketiga, pemerintah setempat juga belum memperhatikan secara maksimal dan intensif untuk

melaksanakan program perencanaan terkait Pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Tarik. Hal itu dibuktikan dengan masih belum banyak kerjasama yang pemerintah setempat lakukan guna mendukung implementasi Pendidikan antikorupsi di SMA tersebut. Sebagai pemegang otoritas pemerintah masih belum memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan antikorupsi ini.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada BAB IV, dapat disimpulkan sebagai berikut: Fenomena korupsi di negeri ini seolah menjadi masalah yang wajar ditemukan, pasalnya sering terungkap dan indikasi tindak kejahatan korupsi melalui pemberitaan baik media elektronik maupun cetak sering memuat berita kasus-kasus korupsi, baik korupsi yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Tindak korupsi inipun mempunyai bermacam-macam modus yang digunakan oleh oknum elit politik guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Aksi-aksi korupsi sering kali dilakukan secara kelompok guna saling menutupi kejahatan yang mereka lakukan, hal itu dilakukan karena korupsi di dalam suatu organisasi dimana organisasi atau lembaga itu berjalan sesuai fungsi yang terkait satu sama lain, dengan demikian maka simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tentang implementasi pendidikan antikorupsi di SMAN 1 Tarik didapatkan bahwa pertama, visi dan misi yang jelas dan penerapannya konsisten akan membawa siswa dalam karakter dan budaya yang baik. kedua, integrasi visi dan misi melalui semua embelajaran dan penerapan zero score sangat membentuk iklim jujur. ketiga dengan adanya kantin kejujuran siswa dilatih langsung kejujurannya terhadap penggunaan uang.

Dalam Implementasi Pendidikan antikorupsi melalui Budaya sekolah untuk mengembangkan rancangan pembelajaran-pembelajaran antikorupsi yang terintegrasi dalam berbagai proses pembelajaran baik pembelajaran melalui mata pelajaran maupun non mata pelajaran untuk menanamkan karakter atau nilai-nilai kejujuran dan pembentukan karakter pada siswa-siswinya. Rancangan pembelajaran antikorupsi terintegrasi dalam pembelajaran mata pelajaran dan penerapan program kantin kejujuran di sekolah sebagai langkah yang efektif untuk membangun nilai kejujuran siswa-siswi dengan self service. Faktor penghambat dalam implementasi Pendidikan antikorupsi pertama, tidak semua siswa dalam hal ini yang menjadi subjek terdidik menerima aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah, seperti masih ada yang mencontek dan merasa aturan tersebut berlebihan.

#### **Saran**

Dari berbagai hal yang sudah dipaparkan di atas maka saran yang bisa disampaikan untuk Implementasi pendidikan antikorupsi ini yaitu: (1) Bagi sekolah senantiasa melakukan pembaruan-pembaruan dan evaluasi guna menjaga dan meningkatkan kualitas kejujuran dan kedisiplinan. kedua untuk pemerintah hendaknya banyak memberikan dukungan-dukungan kepada sekolah dan masyarakat untuk sama-sama memiliki sikap jujur serta pemerintah memperkuat pengawasan-pengawasan kepada para aparat yang ada di negeri ini. (2) Bagi Masyarakat sebagai komponen utama dalam hal pendukung pengawasan penyalahgunaan wewenang di lingkungan sekitar. (3) Dalam pelaksanaan dari Implementasi pendidikan antikorupsi ialah semua elemen yang ada di sekolah harus saling mendukung baik dari guru hingga para siswa-siswa untuk mewujudkan Pendidikan antikorupsi melalui budaya sekolah. (4) Bagi Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi haruslah memiliki karakter yang baik. Selain itu regulasi dan hokum hendaknya diberlakukan tegas dan tepat dalam memerangi korupsi. Pemerintah juga hendaknya memerhatikan Pendidikan guna mendukung program yang melaksanakan Pendidikan antikorupsi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Wibowo. (2012). Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi, Dkk. 1991, Psikologi *Belajar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : RajaGrafindo Perkasa
- Dalyono. 2005. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Antikorupsi*. Semarang. Kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya.
- Hassan, Fuad. 2004. *Pendidikan Adalah Pembudayaan; dalam pendidikan manusia indonesia*. Jakarta : Kompas
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Penguatan Pendidikan Karakter Jadi Pintu Masuk Pembentukan Pendidikan Nasional*. (Online) (<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembentukan-pendidikan-nasional>). Diakses Pada 3 Pebruari 2018.
- Kurnia, Adi. 2012. *Membangun Budaya Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleng, Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mulyasa, H.E. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum* 2013. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pujianto, Dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Erlangga
- Satori, Djama'an dan Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

- Sayed, Al Atlas. 1989. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta : LP3ES
- Soeparwoto, Dkk. 2006. *Psikologi Perkembangan*. Semarang : UNNES Press
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahrudin. 6 Maret 2009. *Kantin Kejujuran Sebuah Alternatif Budaya*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 54 Tentang Hak Anak
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah*. Yogyakarta : Pustaka Belajar

